

**PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA TANJUNGPINANG
DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI TAHUN 2015**

JURNAL



ABSTRAK

Pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengelolaan didalam meningkatkan retribusi parkir maka pemerintah membuat aturan dan sanksi agar pengelolaan retribusi parkir berjalan dengan yang direncanakan. Permasalahan didalam pengelolaan parkir kota Tanjungpinang yaitu masih lemahnya sistem pengawasan, dan untuk menentukan setoran masih menggunakan sistem patok, serta tidak adanya unit pelaksana teknis dinas khusus perparkiran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, pengelolaan parkir di kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi tahun 2015 ini peneliti mengambil 4 indikator dari konsep operasional George R. Terry, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, agar dapat mengetahui hasil dari pengelolaan parkir di kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem Pengelolaan parkir kurang baik sehingga tidak efektif, dikarenakan sistem pengelolalan parkir masih menggunakan sistem patok dan borongan dalam menentukan jumlah setoran, hal itu dapat dilihat dari hasil retribusi yang tidak memenuhi target sementara volume kendaraan semakin banyak, dan kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor juga tidak diikuti dengan kenaikan setoran juru parkir ke dinas perhubungan serta kurangnya pengawasan juga menjadi salah satu penyebab retribusi tidak memenuhi target, dimana pengawas perparkiran hanya beberapa orang saja. Apalagi perparkiran masih dibawah naungan menejemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat dikarenakan belum adanya unit pelaksana teknis dinas khusus perparkiran sehingga membuat perparkiran kurang dapat perhatian sehingga tidak ada tim atau organisasi yang mengatur khusus perparkiran.

Kata kunci: pengelolaan parkir, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan

ABSTRACT

Management is understood as a process of discriminating on the planning, organizing, actuating and controlling by utilizing both a science and an art in order to complete the objectives previously set. With the increase in the management of parking fees, the government makes the rules and the sanctions that the management of parking fees run as planned. Problems in Tanjungpinang city parking management is still weak surveillance systems, and to determine the deposit is still using the peg system, and the lack of technical and operational units specialized agencies parking.

The method used is a qualitative research, the management of parking in the city of Tanjungpinang in increasing the levy of 2015 researchers took four indicators of the operational concept of George R. Terry, planning, organizing, and monitoring, in order to know the results of the management of parking in the city of Tanjungpinang in increasing retribution 2015.

Results from this study is the system of management of parking is not good so ineffective, because the system of parking management is still using the system stakes and contract in determining the amount of the deposit, it can be seen from the results of the levy which do not meet the targets while the volume of vehicles is increasing, and the increase in parking rates motor vehicle is not followed by the increase in deposits of parking attendants to the transportation department and lack of oversight is also one of the causes of retribution did not meet the target, which the supervisors of parking just a few people. Moreover, still under the auspices of parking management and traffic engineering of land transportation due to the lack of technical and operational units specialized parking services so as to make parking less attention so that no team or organization that specifically regulate parking.

Keywords: parking management, planning, organizing, actuating, controlling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebuah negara kesatuan dan merupakan salah satu negara dari berbagai negara didunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban terhadap masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai mana telah di ubah ke dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2000. Ke dua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-Lain Pendapatan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan
4. Lain-Lain pendaptan asli daerah yang sah.

Untuk mewujudkan pembangunan disuatu daerah, maka suatu daerah harus lebih kreatif dalam melahirkan sumber-sumber pendapatan asli daerah,

salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Jasa parkir sangat diperlukan di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang adalah pusat pemerintahan propinsi kepri yang pembangunannya semakin hari semakin berkembang pesat. Pembangunan tersebut tentunya menggunakan anggaran yang besar, dari rincian anggaran tersebut salah satunya retribusi parkir. Lahan parkir sangat diperlukan ditengah-tengah pembangunan yang pesat tersebut, dengan adanya lahan parkir yang luas juga akan menambah pemasukan untuk daerah, serta pengawasan yang terstruktur juga akan mendukung lancarnya pemasukan daerah.

Parkir Tanjungpinang diatur dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Fungsi dari PERDA tersebut untuk mengatur berbagai hal yang mengatur tentang retribusi jasa umum, salah satunya adalah retribusi parkir. Parkir masih perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena masih banyak penyelewengan yang dilakukan baik itu dari juru parkir maupun dari instansi yang menagani tentang parkir. Dinas perhubungan adalah salah satu instansi atau organisasi yang menangani masalah parkir ini

Tabel 1.1
Jumlah Juru Parkir Berdasarkan Wilayah

NO	Wilayah	Jumlah/jiwa
1	Kota Lama	75
2	Tengah	24
3	Timur	21
Jumlah		120

Sumber : Diolah dari data sekunder Dinas Perhubungan Bagian Perhubungan Darat Kota Tanjungpinang

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kota Tanjungpinang terdapat juru parkir yang bertugas di beberapa titik di wilayah kota Tanjungpinang sebanyak 120 orang. Untuk juru parkir di wilayah kota lama berjumlah 75 orang, juru parkir di wilayah tengah berjumlah 24 orang dan juru parkir di wilayah timur berjumlah 21 orang, dengan jumlah lokasi jalan 45 lokasi dan menyeter uang parkir tiap hari/bulannya tetapi belum sesuai dengan volume kendaraan yang ada di kota Tanjungpinang. Berikut ini dapat dilihat target dan realisasi penerimaan retribusi parkir daerah kota Tanjungpinang.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Daerah Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2012	Rp. 316.800.000,-	Rp. 353.830.500,-	111,7 %
2	2013	Rp. 450.000.000,-	Rp. 384.625.000,-	85,47 %
3	2014	Rp. 600.000.000,-	Rp. 406.809.000,-	67,80 %
4	2015	Rp. 750.000.000,-	Rp. 436.952.900,-	58,26 %

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan retribusi parkir melebihi dari target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 353.830.500,- atau sebesar 111,7% dari target Rp. 316.800.00,-. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi parkir adalah sebesar Rp. 384.625.000,- atau sebesar 85,47% dari target yang direncanakan adalah Rp. 450.000.000,-. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi parkir adalah sebesar Rp. 406.809.000,- atau sebesar 67,80% dari target yang direncanakan adalah Rp. 600.000.000,-. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan retribusi parkir adalah sebesar Rp.

436.952.900,- atau sebesar 58,26 % dari target yang direncanakan adalah Rp. 750.000.000,-.

Target dan realisasi retribusi parkir di kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Sementara dengan volume kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya seharusnya retribusi parkir dapat terealisasi dengan baik. Pungutan retribusi parkir di tahun 2015 tidak mencapai target dengan target Rp. 750.000.000,- hanya terealisasi sekitar Rp. 436.952.900,- sekitar 58,26% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal jumlah titik parkir di kota Tanjungpinang 45 titik lokasi yang dinas perhubungan kelola dan juga peningkatan dari penambahan lahan parkir dan peningkatan jumlah kendaraan di kota Tanjungpinang baik motor dan mobil.

Retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan yang mana tarif parkir yang telah ditentukan untuk kendaraan roda dua Rp.1000 dan roda empat Rp.2000 langsung masuk ke kas pemerintah. Sedangkan Pajak parkir itu adalah sistem bagi dengan orang ketiga yaitu pengusaha yang akan mengelola parkir ditempat usahanya seperti Pinang Lestari, Ramayana, Bestari Mall, Bintang Mall, Pinang city Walk. Mereka mengelola sendiri parkirnya tetapi harus membayar pajak parkir dengan pemerintah. Sistem pembayaran pajak parkir yaitu dihitung dari luas wilayah parkir. Untuk kota Tanjungpinang pertambahan kendaraan tiap bulannya sekitar 500 unit untuk sepeda motor dan 100-150 unit untuk kendaraan roda empat dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

Hingga saat ini, pendapatan dari retribusi parkir di kota Tanjungpinang untuk daerah belum jelas, banyak lahan dan pekerja parkir yang tersedia di kota

Tanjungpinang, namun sektor pendapatan dari tarif ini untuk kendaraan bermotor masih sedikit setiap tahunnya. Ditahun 2012 sampai tahun 2015 kota Tanjungpinang belum menggunakan sistem karcis parkir karena masih menggunakan peraturan daerah sistem borong perlokasi tempat parkir, tergantung kemampuan setor di lokasi tersebut.

Pertambahan jumlah kendaraan di kota Tanjungpinang tidak berbanding lurus dengan bertambahnya retribusi parkir. Penyebab stagnannya besaran retribusi parkir setiap tahunnya yaitu sistem pungutan parkir yang lebih kepada sistem individual. Kemudian lemahnya pengawasan dinas terkait. Untuk peningkatan pendapatan perlu adanya intensifikasi dalam pengelolaannya sehingga diharapkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi parkir meningkat.

Tentunya dalam menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam kegiatan perparkiran ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi kebijakan, pengelolaan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas organisasi komunikasi, serta kemampuan dan keterampilan dari pemerintah itu sendiri, sehingga dengan hal ini sangat menarik untuk dikaji tentang Pengelolaan Parkir di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan semakin meningkatnya volume kendaraan yang masuk di kota Tanjungpinang setiap tahunnya tetapi hasil dari retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan

dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berada di kota Tanjungpinang sehingga membuat pemerintah kota Tanjungpinang berusaha meningkatkan hasil dari retribusi parkir, maka terdapat target yang ingin direalisasikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi parkir, dari penjelasan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana **PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI TAHUN 2015 ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Parkir di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan upaya mendefenisikan atau membatasi ruang lingkup masalah penulisan sesuai dengan indikator yang telah diterapkan

dalam teori yang telah dibuat sehingga dapat diterapkan untuk melaksanakan penelitian dilapangan.

Untuk memperjelas maksud dan pengertian, serta menghindari timbulnya kesalahan penafsiran dalam penelitian maka perlu menguraikan batasan konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai mana yang disampaikan oleh George R. Terry.

George R. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana suatu proses membeda-bedakan yang dimaksud ialah :

1. Perencanaan yang dimaksud adalah proses mendefinisikan tujuan pemerintah membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktifitas kerja pemerintah dalam pengelolaan parkir. Fungsi dari perencanaan sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan.
2. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan merancang struktur formal dengan cara mengelompokkan, mengatur, dan membagi aktifitas kedalam atau kepada unit-unit kerja.
3. Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakan seluruh unit kerja dalam pengelolaan parkir agar bekerja sama dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan cara yang baik dan benar supaya mencapai tujuan yang telah direncanakan.

4. Pengawasan merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001: 3) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan bagaimana Pengelolaan Parkir di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015, kemudian dianalisis dan hasilnya diuraikan secara kualitatif yang digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Tanjungpinang, guna memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan ini sekaligus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada responden yang meliputi data tentang Pengelolaan

Parkir Di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015

- b. Data Sekunder yaitu data yang telah baku diperoleh dari pihak lain di antara dari perpustakaan, koran, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono 2010:300), “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang informan dan terdiri dari beberapa karakteristik yang ditentukan dalam menentukan informan. Berikut ini informan dengan beberapa karakteristik yang berbeda yaitu Kepala Bidang Perhubungan Darat. Kepala Bidang Perhubungan Darat adalah informan dari salah satu bidang di dinas perhubungan, salah satu informan yang mengetahui semuanya tentang pengelolaan parkir dan cara meningkatkan retribusi. Dari karena itulah penulis mengambil informan dari kepala bidang perhubungan darat. Kemudian Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai salah satu dari informan dikarenakan dia yang bertugas sebagai pengelola perparkiran kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Juru parkir terdiri dari beberapa juru parkir dan dititik yang berbeda-beda. Yang terakhir Masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan ini adalah masyarakat yang mengetahui dan merasakan dampak dari pengelolaan parkir seperti tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mengetahui tentang perparkiran.

5. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian ini sebagai berikut: suatu penelitian dikatakan berkualitas dilihat dari instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data.

Nasution (dalam Sugiyono, 2010:223), “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu”. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data terdiri dari:

a. Observasi

Merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses ataupun penampilan tingkah laku orang. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah panduan observasi atau semacam daftar *check list* yaitu daftar yang berisikan catatan-catatan yang

bertujuan untuk memberi masukan informasi awal mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Lisa Harison (2007:106) wawancara tak berstruktur adalah struktur wawancara ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna, yakni kita mengajukan pertanyaan apabila tepat, dan kita memilih sendiri susunan kata yang tepat. Sehingga dapat dengan mudah mengorek informasi mendalam dari informan tanpa terfokus pada pertanyaan yang telah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Penulis juga memperoleh data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari teori dari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen tertulis lainnya Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, kamera, telpon genggam, alat tulis dan perekam suara.

F. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Moleong, (2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

George R. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Retribusi Daerah

Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008 : 74), mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung

C. Retribusi Parkir

Kesit Bambang Prakosa (2003:88) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan pengertian parkir menurut pignataro (2001) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu.

D. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 18 “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

E. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi

Halim (2008:147) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk Perubahan Tarif Pajak dan retribusi daerah dan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 00 51' s/d 00 59' LU dan 104 23' s/d 104 34' BT. Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, batas-batas wilayah sebagai berikut:

Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 Km² dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi laut. Luas daratan 131, 54 km² (55%) dan luas lautan 107, 96 km² (45%). Penduduk Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari setiap tahunnya. Faktor pertambahan jumlah penduduk disebabkan oleh migrasi yang terjadi setiap bulannya karena banyaknya orang dari daerah luar yang datang dan menetap di kota Tanjungpinang.

Kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang pada periode 2012-2015 mengalami peningkatan, ini disebabkan makin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dengan luas daratan sebesar 131, 54 km², setiap km ditempati penduduk sebanyak 1.518 jiwa. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka sarana dan prasarana di Kota Tanjungpinang akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kendaraan roda dua 56.047 dan jumlah kendaraan roda empat 15.597. Untuk Kota Tanjungpinang pertambahan

kendaraan tiap bulannya sekitar 500 unit kendaraan roda dua dan 100-150 unit kendaraan roda empat dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

Kota Tanjungpinang terdapat juru parkir yang bertugas di beberapa titik di wilayah Kota Tanjungpinang sebanyak 120 orang. Untuk di wilayah kota lama 75 orang, wilayah tengah 24 orang dan wilayah timur 21 orang, dengan jumlah lokasi jalan 45 lokasi. Tahun 2015 Kota Tanjungpinang belum menggunakan sistem karcis parkir karena masih menggunakan peraturan daerah sistem borong perlokasi tempat parkir, tergantung kemampuan setor di lokasi tersebut.

B. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah salah satu instansi atau organisasi yang menangani masalah parkir di kota Tanjungpinang. Kabid Perhubungan Darat. Organisasi yang menangani masalah perparkiran di kota Tanjungpinang adalah Bidang Perhubungan darat di Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2009, Bidang Perhubungan Darat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Perhubungan Darat.

Bidang Perhubungan Darat membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Efektif tidaknya suatu peran atau tugas-tugas yang dilaksanakan tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan pengelolaan parkir yang ada didalam organisasi pemerintahan tersebut. Untuk jumlah pegawai di bidang perhubungan darat berjumlah 71 orang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Demikian pula pada pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi tahun 2015, harus ada upaya intensifikasi dalam pengelolaan agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015 yang dideskripsikan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi tahun 2015, maka perlu adanya perumusan

perencanaan dari Dinas Perhubungan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Perencanaan dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi tahun 2015 ini dilakukan terlebih dahulu oleh atasan untuk merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan dengan melakukan pembagian lahan kerja dan penyiapan lahan dalam kegiatan pengelolaan parkir di kota tanjungpinang. Untuk melengkapi data tentang perencanaan dalam kegiatan pengelolaan parkir ini terlebih dahulu peneliti menanyakan mengenai sistem pengelolaan yang ada di kota tanjungpinang, pertanyaan sistem pengelolaan parkir seperti apa yang digunakan di kota tanjungpinang pada tahun 2015

Dari jawaban keseluruhan informandapat dianalisis bahwa sistem pengelolaan parkir di kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi yaitu, bisa dilihat bahwa sistem yang digunakan pada tahun 2015 adalah sistem patok dititik parkir sistem ini juga dinilai tidak efektif, dalam kenaikan parkir yang awalnya Rp 500,- menjadi Rp 1000,- tidak serta merta diikuti dengan naiknya setoran juru parkir ke dinas perhubungan. Hal ini perlunya kejelian dan ketegasan dari pemerintah kota tanjungpinang untuk mengevaluasi agar terealisasinya target yang ingin dicapai.

Masih dalam aspek perencanaan di atas, peneliti juga mewawancarai mengenai ketersediaan lahan parkir yang ada di kota Tanjungpinang. Dari tanggapan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa lahan yang tersedia di Kota Tanjungpinang kurang, lahan yang ada saat ini banyak menggunakan badan jalan. Perlu adanya penambahan atau perluasan lahan parkir di Kota

Tanjungpinang agar dapat meningkatkan retribusi. Maka jika dianalisa dan dikaitkan dengan aspek dimensi perencanaan, dapat disimpulkan bahwa butuh perluasan lahan atau penambahan lahan untuk proses pengelolaan parkir yang ada di kota Tanjungpinang agar pengelolaan parkir bisa lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dari pengelolaan, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata —Organism”. Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Tahapan ini menguraikan tentang pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari keseluruhan informan tentang penorganisasian, bahwa disini bisa dianalisis di kota tanjungpinang terdapat tidak adanya pengorganisasian dalam pengelolaan parkir. Struktur organisasi khusus dalam pengelolaan perparkiran juga belum ada. Agar dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik, harus dibentuk pengorganisasian seperti struktur organisasi khusus untuk mengelola parkir dibentuk unit pelaksana teknis dinas perparkiran.

Masih dalam aspek pengorganisasian di atas, peneliti juga mewawancarai mengenai Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan parkir yang ada di kota Tanjungpinang. Sumber Daya Manusia didalam organisasi atau instansi sangatlah berpengaruh besar untuk mengerakkan organisasi tersebut. Maka dengan ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang lengkap.

Maka dengan itu, peneliti memberikan pertanyaan tentang ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas perhubungan dalam mengelola perparkiran di kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara dalam sumber daya manusia untuk pengelolaan parkir belum memadai. Personil nya sangat kurang. Untuk pembagian kerja dalam pengelolaan parkir pun hanya ada juru pungut dan juru parkir. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan parkir di kota tanjungpinang itu merupakan penghambat dalam melaksanakan tugas-tugas agar dapat sesuai denganpelaksanaan yang ingin dicapai.

3. Penggerakkan

Penggerakkan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Jadi penggerakkan artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Penggerakkan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam pengelolaan, penggerakkan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Dari Hasil wawancara dan hasil observasi berkaitan dengan kinerja juru parkir terhadap beberapa orang masyarakat atau yang dikatakan dengan informan kota Tanjungpinang dapat di analisis bahwa penggerakkan dan pengarahan yang diberikan oleh dishub dilakukan dengan cukup baik oleh para juru parkir, hal itu dibuktikan setelah peneliti mewawancarai beberapa orang masyarakat kota tanjungpinang. Dari tiga orang masyarakat tersebut, mereka menyatakan bahwa juru parkir kota tanjungpinang bekerja dengan cukup baik dan pelayanannyapun memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disini peneliti menganalisi mengenai pengerakan dalam pengolaan parkir bahwa disini bisa dilihat pertama

keseluruhan juru parkir setiap enam bulan sekali diadakan panggilan ke kantor dinas perhubungan untuk adanya pengarahan dari kepala dinas mengenai kondisi dilapangan. Kemudian enam bulan orang dari dinas perhubungan turun langsung kelapangan untuk mengarahkan para juru parkir, dan setiap harinyapun pada saat juru pungut mengambil setoran ke juru parkir para juru pungut memberi arahan dan mengingatkan para juru parkir agar bekerja sesuai rencana pergerakan. Dimana mereka sebagai juru parkir harus bisa menjalankan tugasnya yang di arahkan harus berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa juru parkir melayani dan bertugas dengan baik.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan. Pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir merupakan hal yang sangat penting. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan parkir agar optimal pemungutan retribusinya. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pengelolaan parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan parkir di kota Tanjungpinang tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang. Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pengelolaan parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Dari penjelasan keseluruhan informan disini dapat dianalisis dari keseluruhan jawaban yang didapatkan, bahwa didalam pengawasan dilapangan sangatlah lemah, hal ini didapatkan dari semua inofrman yang menyatakan sangatlah kurang rasa tanggung jawab dari pihak dinas terkait. Disini seharusnya bisa digiatkan lagi bagi pengawasan supaya tidak ada penyelengenan seperti pengelapan uang, atau korupsi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa, sistem Pengelolaan parkir kurang baik sehingga tidak efektif, dikarenakan sistem pengelolalan parkir masih menggunakan sistem patok dan borongan dalam menentukan jumlah setoran, hal itu dapat dilihat dari hasil retribusi yang tidak memenuhi target sementara volume kendaraan semakin banyak, dan kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor juga tidak diikuti dengan kenaikan setoran juru parkir kedinas perhubungan serta kurangnya pengawasan. Perparkiran masih dibawah naungan menejemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat dikarnakan belum adanya unit pelaksana teknis dinas khusus perparkiran sehingga membuat perparkiran kurang dapat perhatian sehingga tidak ada tim atau organisasi yang mengatur khusus perparkiran.

Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan parkir yang dihadapi pemerintah Kota Tanjungpinang terutama dalam hal pengelolaan parkir yaitu

1. Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini sistem pengelolaan parkir yang digunakan masih belum efektif karena menggunakan sistem patok atau borongan perlokasi parkir.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam hal ini dengan tidak adanya unit pelaksana teknik dinas perparkiran maka kinerja dari petugas dishub masih kurang dan tidak berjalan dengan baik serta tidak terstruktur..

3. Penggerakkan

Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir sudah berjalan dengan cukup baik.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait sangat kurang dan lemah, karena jumlah personil yang bertugas sangat sedikit.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan pengelolaan parkir di kota Tanjungpinang dalam meningkatkan retribusi dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepada dinas perhubungan agar dapat merubah sistem patok dan borongan sehingga dalam jumlah setoran juru parkir ke dinas tidak di hitung dari borongan dan patokan, tetapi seharusnya sesuai dengan hasil survei dan tidak ada negosiasi antara petugas dinas dan juru parkir didalam pemungutannya.
2. Kepada pemerintah harus cepat membuat unit pelaksana teknis dinas perparkiran agar semua tugas perparkiran berjalan dengan baik dan terstruktur.

3. Kepada dinas perhubungan supaya terus memberikan penggerakan seperti yang sudah dilakukan bukan hanya sesekali saja.
4. Kepada dinas perhubungan agar bisa mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai dan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan supaya pengawasan berjalan dengan baik dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bahrullah, Akbar. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan*. Jakarta : BPK
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Prenada Media Group
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2006. Jakarta : Balai Pustaka
- Kustiawan, M. dan I. Solikin. 2011. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah*.
<http://www.intensifikasidanekstensifikasi.com>. 27 Juli 2014 (11.11).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Reksohadiprdjo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Richard, Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Salemba Emban Patria
- Siahaan, M. P. 2007. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sidik, Mahfud. 1997. *Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi daerah : Implikasinya terhadap Penerimaan Daerah*. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Jendral pajak. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Afabeta
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Tunliu, J.J. 2008. *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

C. Internet

<http://kepri.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>

https://id.wikipedia.org/wiki/kota_tanjungpinang

D. Jurnal

Aditya Wisnu Priambodo, 2013. *Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang*.

Mhd. Syukron Hartanto, 2015. *Efektifitas Pengelolaan Parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang*. Tanjungpinang : program studi ilmu pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

E. Dokumen

Arsip : *Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Daerah Kota Tanjungpinang*; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Arsip : *Daftar Pajak Parkir di Kota Tanjungpinang*; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang